

## PEMANFAATAN LAHAN TERBENGGALAI UNTUK MENCETAK PROFITABILITAS UMKM - CIMANUK- PANDEGLANG

<sup>1</sup> Sultan Antus Nasruddin Mohammad, <sup>2</sup>Muzayannah

<sup>1,2</sup>Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: sultan@iiq.ac.id

### Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of the Indonesian economy, yet they face significant structural challenges, particularly the limited access to productive land. This article analyzes the potential, challenges, and strategies for utilizing abandoned land to enhance MSME profitability, based on a participatory case study in Cimanuk District, Pandeglang. This study employed a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, participant observation, and Focus Group Discussions (FGDs). The findings indicate that abandoned land possesses significant potential as a community asset that can be activated for productive economic activities such as hydroponic agriculture, medicinal plant cultivation, and local crafts. However, its utilization is hampered by systemic barriers, including limited access to finance, low technical skills, complex regulatory hurdles, and inadequate infrastructure. The research concludes that overcoming these challenges requires an integrated, multi-stakeholder collaborative strategy involving local government, financial institutions, and the community. The Cimanuk model demonstrates that activating underutilized local assets not only increases MSME income by up to 30% but also contributes directly to achieving Sustainable Development Goals (SDGs), particularly those related to poverty reduction, food security, and decent work.*

**Keywords:** *Abandoned Land; MSME Profitability; Local Economic Development; Community Empowerment; Sustainable Development*

### Abstrak

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun menghadapi tantangan struktural yang signifikan, terutama keterbatasan akses terhadap lahan produktif. Artikel ini menganalisis potensi, tantangan, dan strategi pemanfaatan lahan terbengkalai untuk meningkatkan profitabilitas UMKM, berdasarkan studi kasus partisipatoris di Kecamatan Cimanuk, Pandeglang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan terbengkalai memiliki potensi besar sebagai aset komunitas yang dapat diaktivasi untuk kegiatan ekonomi produktif seperti pertanian hidroponik, budidaya tanaman obat, dan kerajinan lokal. Namun, pemanfaatannya terhambat oleh berbagai kendala sistemik, meliputi keterbatasan akses permodalan, rendahnya keterampilan teknis, hambatan regulasi yang kompleks, serta infrastruktur yang tidak memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi kolaboratif multi-pihak yang terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Model di Cimanuk membuktikan bahwa aktivasi aset lokal yang terabaikan tidak hanya meningkatkan pendapatan UMKM hingga 30% tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama terkait pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pekerjaan layak.*

**Kata kunci:** *Lahan Terbengkalai; Profitabilitas UMKM; Pembangunan Ekonomi Lokal; Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kemampuan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional, sektor ini terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meskipun demikian, di balik data agregat yang impresif, UMKM, khususnya yang berada di wilayah perdesaan, menghadapi paradoks fundamental: potensi besar yang terhambat oleh tantangan struktural yang persisten. Salah satu tantangan paling krusial adalah keterbatasan akses terhadap ruang usaha yang strategis dan terjangkau, yang ironisnya terjadi di tengah melimpahnya lahan-lahan yang tidak produktif atau terbengkalai.

Fenomena lahan terbengkalai merupakan sebuah inefisiensi ekonomi sekaligus peluang pembangunan yang terlewatkan. Lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal ini, jika dikelola dengan baik, dapat ditransformasikan menjadi aset produktif untuk berbagai kegiatan UMKM, mulai dari pertanian, peternakan, industri kerajinan, hingga penyediaan fasilitas usaha komersial. Permasalahan ini telah menjadi perhatian pemerintah, yang tercermin dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Regulasi ini menyediakan kerangka hukum untuk mengidentifikasi, menertibkan, dan mendayagunakan kembali tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional, termasuk melalui program reforma agraria. Dengan demikian, inisiatif pemanfaatan lahan terbengkalai di tingkat lokal selaras secara strategis dengan arah kebijakan nasional untuk optimalisasi aset dan pemerataan ekonomi.

Signifikansi pemanfaatan lahan terbengkalai melampaui sekadar peningkatan profitabilitas UMKM. Inisiatif ini merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka *Triple Bottom Line* yang digagas oleh Elkington (1997), pemanfaatan lahan ini menyentuh tiga dimensi sekaligus: ekonomi (peningkatan pendapatan), sosial (penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan komunitas), dan lingkungan (mengubah lahan non-produktif menjadi area hijau yang produktif). Lebih jauh lagi, upaya ini berkontribusi langsung pada pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau

*Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan menyediakan akses terhadap sumber daya produktif bagi kelompok masyarakat rentan, program ini mendukung pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta mewujudkan prinsip fundamental SDGs untuk tidak meninggalkan seorang pun (*leaving no one behind*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam potensi, tantangan, dan strategi pemanfaatan lahan terbengkalai untuk meningkatkan profitabilitas UMKM, dengan mengambil studi kasus dari program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara partisipatoris di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah model pemberdayaan ekonomi lokal yang replikabel dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus partisipatoris. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami fenomena pemanfaatan lahan terbengkalai secara mendalam dan holistik dalam konteks sosial-ekonomi yang spesifik di Kecamatan Cimanuk, Pandeglang. Desain partisipatoris menekankan interaksi aktif dan kolaboratif antara peneliti dengan para partisipan, yang memungkinkan penggalan data yang kaya dan kontekstual.

Partisipan dalam penelitian ini meliputi para pelaku UMKM yang menjadi target program, tokoh masyarakat, pengelola lahan, serta perwakilan pemerintah daerah di Cimanuk. Keterlibatan beragam pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai dinamika pemanfaatan lahan di wilayah tersebut. Lokasi penelitian difokuskan pada area-area di Cimanuk yang memiliki lahan terbengkalai dan berpotensi untuk dikembangkan oleh UMKM lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interviews*) semi-terstruktur dilakukan dengan para pelaku UMKM dan pemangku kepentingan kunci untuk menggali pengalaman, persepsi, tantangan, dan harapan mereka. Kedua, observasi partisipatif dilaksanakan dengan terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari para pelaku UMKM untuk memahami proses operasional, dinamika sosial, dan kendala faktual di lapangan. Ketiga, Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* - FGD) diselenggarakan untuk memfasilitasi dialog antar-partisipan, mengklarifikasi temuan, dan secara kolektif merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Data kualitatif yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini meliputi transkripsi data, pengkodean, identifikasi pola atau tema-tema yang muncul, dan interpretasi tema-tema tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan FGD).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potensi Lahan Terbengkalai sebagai Aset Komunitas yang Teraktivasi

Hasil pemetaan lapangan di Kecamatan Cimanuk mengidentifikasi adanya sejumlah aset lahan yang belum termanfaatkan secara optimal, seperti lahan pertanian yang tidak lagi produktif, tanah kosong di sekitar area permukiman, dan lahan milik pemerintah yang tidak terkelola. Melalui diskusi partisipatif dengan masyarakat, lahan-lahan ini diidentifikasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai jenis usaha produktif, antara lain pertanian hidroponik untuk sayuran organik, budidaya tanaman obat keluarga (TOGA) yang memiliki nilai pasar, serta pusat produksi kerajinan tangan berbasis bahan baku lokal.

Proses identifikasi dan mobilisasi potensi ini dapat dianalisis melalui kerangka teoretis *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ABCD menekankan bahwa pembangunan komunitas yang berkelanjutan dimulai dari pengenalan dan

pemanfaatan aset atau potensi yang sudah ada di dalam komunitas itu sendiri, bukan berfokus pada kekurangan atau masalahnya. Dalam konteks Cimanuk, lahan terbengkalai yang semula dipandang sebagai ruang mati atau masalah lingkungan, direkonseptualisasi menjadi aset ekonomi yang laten. Intervensi program tidak memberikan aset dari luar, melainkan memfasilitasi komunitas untuk mengenali, menghargai, dan mengaktivasi sumber daya yang mereka miliki. Dengan demikian, pemberdayaan yang terjadi bersifat intrinsik dan membangun kapasitas lokal untuk mengelola aset desa secara mandiri demi peningkatan kesejahteraan, sebuah prinsip yang juga menjadi inti dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif.

### **Analisis Tantangan Struktural dalam Pemanfaatan Lahan oleh UMKM**

Meskipun potensi yang ada sangat besar, upaya UMKM di Cimanuk untuk memanfaatkan lahan terbengkalai terbentur oleh serangkaian tantangan yang bersifat sistemik. Kendala-kendala ini bukan sekadar masalah lokal, melainkan cerminan dari isu-isu struktural yang lebih luas yang dihadapi UMKM di seluruh Indonesia.

Pertama, hambatan akses permodalan menjadi kendala utama. Mayoritas pelaku UMKM di Cimanuk tidak memiliki cukup dana untuk investasi awal, baik untuk sewa lahan, pembelian bibit, maupun pembangunan infrastruktur sederhana. Masalah ini diperparah oleh sulitnya mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Sebagaimana ditemukan dalam berbagai studi nasional, UMKM seringkali dianggap tidak

*bankable* karena tidak mampu memenuhi persyaratan jaminan (kolateral) yang rigid, memiliki catatan keuangan yang tidak memadai, dan rendahnya literasi keuangan. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus ketergantungan pada sumber pendanaan informal dengan bunga tinggi atau modal pribadi yang terbatas.

Kedua, terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan teknis. Banyak pelaku UMKM di Cimanuk yang memiliki semangat wirausaha namun tidak dibekali dengan pengetahuan teknis yang memadai untuk mengelola lahan secara produktif, seperti metode pertanian modern, manajemen bisnis, atau strategi pemasaran digital. Keterbatasan sumber daya manusia ini merupakan salah satu penghambat utama pertumbuhan UMKM secara nasional, di mana manajemen usaha yang masih bersifat tradisional menghalangi kemampuan untuk berinovasi dan bersaing.

Ketiga, kendala regulasi dan birokrasi menjadi tembok penghalang yang signifikan. Proses pengurusan izin penggunaan lahan, terutama yang berstatus milik pemerintah atau memiliki status hukum yang tidak jelas, seringkali rumit, memakan waktu lama, dan tidak transparan. Birokrasi yang berbelit ini menciptakan ketidakpastian dan disinsentif bagi UMKM untuk berinvestasi dalam pemanfaatan lahan, sebuah masalah yang juga diidentifikasi sebagai salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Keempat, keterbatasan infrastruktur dan akses pasar turut menjadi faktor pembatas. Beberapa lokasi lahan potensial berada di daerah yang sulit dijangkau, tanpa akses jalan yang memadai untuk distribusi produk. Hal ini menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi dan membatasi jangkauan pasar UMKM.<sup>1</sup> Keterisolasian ini merupakan

masalah klasik dalam pembangunan perdesaan yang menghambat integrasi produsen lokal ke dalam rantai nilai yang lebih luas.

### Merumuskan Strategi Pemberdayaan Kolaboratif Multi-Pihak

Mengatasi tantangan yang kompleks dan saling terkait tersebut menuntut sebuah pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, bukan solusi parsial. Berdasarkan temuan di Cimanuk, dirumuskan sebuah model strategi pemberdayaan yang melibatkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Model ini tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan, tetapi pada penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Strategi ini dibangun di atas empat pilar utama, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1. Pertama, penyediaan skema pembiayaan yang aksesibel, seperti pinjaman lunak atau dana bergulir yang tidak mensyaratkan agunan konvensional. Kedua, program pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM. Ketiga, advokasi untuk simplifikasi regulasi dan penyediaan layanan perizinan satu atap di tingkat daerah. Keempat, pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas dan akses pasar.

Keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada model tata kelola kolaboratif. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang pro-UMKM, dengan menyederhanakan perizinan dan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pendukung. Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan mikro, perlu berinovasi dalam merancang produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Sementara itu, akademisi dan praktisi pembangunan (seperti tim pelaksana program pengabdian ini) berkontribusi melalui transfer pengetahuan dan pendampingan teknis. Terakhir, partisipasi aktif dari komunitas UMKM itu sendiri menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap intervensi relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

**Tabel 1.** Matriks Tantangan dan Rekomendasi Strategis Pemberdayaan UMKM di Cimanuk

No.	Dimensi Tantangan	Deskripsi Masalah (Temuan Lapangan)	Rekomendasi Strategis	Pihak Terkait
1	Permodalan	Kesulitan mengakses pinjaman formal karena ketiadaan agunan dan prosedur yang rumit; ketergantungan	Mengembangkan skema pembiayaan mikro (dana bergulir, pinjaman kelompok) dengan bunga rendah dan tanpa agunan konvensional.	Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Mikro, Perbankan Syariah, BUMDes

No.	Dimensi Tantangan	Deskripsi Masalah (Temuan Lapangan)	Rekomendasi Strategis	Pihak Terkait
		pada modal terbatas.		
2	Keterampilan & SDM	Kurangnya pengetahuan teknis dalam metode pertanian modern, manajemen usaha, dan pemasaran digital.	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan sesuai kebutuhan spesifik usaha.	Perguruan Tinggi, Dinas Koperasi & UKM, Praktisi/Ahli
3	Regulasi & Kebijakan	Proses perizinan penggunaan lahan yang birokratis, lama, dan tidak transparan, terutama untuk lahan pemerintah.	Menyederhanakan prosedur perizinan lahan untuk UMKM; menyediakan layanan bantuan hukum dan administrasi terpadu.	Pemerintah Daerah (Dinas Pertanahan, DPMPTSP)
4	Infrastruktur & Pasar	Akses jalan yang terbatas ke lokasi lahan; kesulitan dalam distribusi produk dan menjangkau pasar yang lebih luas.	Membangun/memperbaiki infrastruktur dasar (jalan usaha tani); memfasilitasi akses ke pasar digital ( <i>e-commerce</i> ) dan pasar lokal.	Pemerintah Daerah (Dinas PUPR), Kementerian Desa, Platform Digital

### Implikasi Sosio-Ekonomi dan Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi model pemanfaatan lahan terbengkalai di Cimanuk menunjukkan dampak sosio-ekonomi yang signifikan. Secara kuantitatif, para pelaku UMKM yang terlibat dalam program ini melaporkan peningkatan pendapatan rata-rata hingga 30% dalam beberapa bulan pertama.<sup>1</sup> Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan rumah tangga individu, tetapi juga menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam ekonomi lokal melalui peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja baru.

Namun, dampak program ini jauh melampaui angka-angka ekonomi. Secara sosial, program ini berhasil meningkatkan solidaritas dan kolaborasi antar pelaku UMKM, serta menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap aset komunal. Transformasi lahan yang terabaikan menjadi ruang produktif yang hijau juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dalam perspektif yang lebih luas, inisiatif di Cimanuk ini merupakan contoh konkret bagaimana aksi di tingkat akar rumput dapat berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional dan global. Dengan mengubah aset yang tidak produktif menjadi sumber penghidupan, program ini secara langsung mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Peningkatan pendapatan berkontribusi pada

SDG 1 (Tanpa Kemiskinan). Pengembangan usaha di sektor pertanian lokal mendukung SDG 2 (Tanpa Kelaparan). Penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal sejalan dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Pemberian akses sumber daya kepada kelompok masyarakat di perdesaan membantu mengurangi kesenjangan, sesuai dengan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan). Terakhir, praktik pemanfaatan lahan secara efisien dan produktif merupakan bagian dari SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).<sup>7</sup> Dengan demikian, model pemberdayaan ini membuktikan bahwa investasi pada UMKM berbasis aset lokal adalah strategi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan lahan terbengkalai di Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, memiliki potensi yang sangat besar sebagai katalisator untuk meningkatkan profitabilitas UMKM dan mendorong pembangunan ekonomi lokal yang inklusif. Transformasi aset yang terabaikan menjadi sumber daya produktif terbukti mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan, dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, realisasi potensi ini tidak berjalan tanpa hambatan. UMKM dihadapkan pada tantangan-tantangan struktural yang bersifat sistemik, meliputi keterbatasan akses permodalan, kesenjangan keterampilan teknis, kerumitan regulasi pertanahan, serta minimnya infrastruktur pendukung. Tantangan-tantangan ini saling terkait dan tidak dapat diatasi secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi pemberdayaan yang terintegrasi dan berbasis pada kolaborasi multi-pihak. Model yang efektif harus melibatkan sinergi antara pemerintah daerah sebagai fasilitator kebijakan, lembaga

keuangan dalam penyediaan modal yang aksesibel, akademisi dalam transfer pengetahuan, dan partisipasi aktif dari komunitas UMKM itu sendiri.

Studi kasus di Cimanuk memberikan pelajaran berharga bahwa pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan dapat dicapai dengan mengaktivasi aset-aset yang sudah ada di dalam komunitas. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan studi longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang dari intervensi semacam ini terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, studi komparatif di berbagai daerah dengan konteks yang berbeda dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan model pemanfaatan lahan untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Austin, T., & Marleni. (2021). Implementasi Program Kampung Iklim: Urban Farming Melalui Hidroponik dan Budikdamber di Kelurahan Sialang Palembang. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 96–104.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing.
- Hendro, et al. (2020). *Kewirausahaan*. Erlangga. (Sebagaimana dikutip dalam laporan).
- Huda, S. A. N., Hidayatullah, M. S., Aisyah, S., & Septiani, R. (2023). Pemanfaatan Lahan Pertanian, Sosialisasi Koperasi Syariah Dan Peningkatan Kualitas UMKM Di Lingkungan RW 02 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(2), 96–101.
- Kastanja, A. Y., Patty, Z., & Dilago, Z. (2020). Pemanfaatan pekarangan mendukung ketahanan pangan masyarakat Desa Kali Upa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 173-181.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). *Laporan Perkembangan UMKM*. (Sebagaimana dikutip dalam laporan).
- Lundin, M. (2018). *Sustainable Land Management*. Routledge. (Sebagaimana dikutip dalam laporan<sup>1</sup>).
- Nasruddin M, S. A., & Muzayanah. (2022). *Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemanfaatan Lahan Terbengkalai untuk Mencetak Profitabilitas UMKM - Cimanuk-Pandeglang*. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Pertiwi, A. D., dkk. (2025). Model Pemberdayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Aset Desa dengan Metode ABCD (*Asset Based Community Development*). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 620-628.

- Sholikin, A. (2024). Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, dan Digitalisasi. *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3), 428-445.
- Soemartono, G. (2017). *Kebijakan Pertanahan*. Gramedia Pustaka Utama. (Sebagaimana dikutip dalam laporan.
- Stiglitz, J. E. (2017). *The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them*. W. W. Norton & Company.
- Susilo, Y. S., & Krisnadewara, B. (2022). Pemberdayaan UMKM Menuju *Entrepreneur Village* di Desa Cibingbin Kecamatan Cibaliung. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 9(2), 37-43.
- Thenny, B. B., Rumimpunu, D., & Mandey, M. (2024). Kajian Yuridis Pemanfaatan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. *Jurnal Administratum*, 11(1), 16-27.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN General Assembly.
- Wagner, G. (2019). *Community Empowerment and Sustainable Development*. Palgrave Macmillan. (Sebagaimana dikutip dalam laporan.
- Yuliana, Y., & Rahayu, S. (2022). Tantangan UMKM dalam Mengakses Layanan Keuangan di Kota Sukabumi. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan (SAK)*, 1(03), 120-130. <sup>13</sup>